

# Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelayanan Publik: Studi Kementerian Agama Di Kabupaten Asmat

Yulianus Tuakra

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro Merauke

<sup>1\*</sup> [yulianustuakara24@gmail.com](mailto:yulianustuakara24@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian Agama di Kabupaten Asmat, dengan fokus pada mekanisme pelayanan berbasis lokal dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan 30 hingga 40 subjek dari berbagai kelompok, seperti petugas Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam program pemberdayaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berbasis lokal yang mempertimbangkan budaya dan tradisi masyarakat Asmat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program pemberdayaan berbasis nilai agama juga memperkuat kohesi sosial, meningkatkan keterampilan, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di daerah tersebut. Meskipun ada tantangan terkait infrastruktur dan aksesibilitas, pendekatan berbasis kolaborasi dan pemahaman budaya lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah terpencil.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat; Pelayanan Publik; Pendekatan Berbasis Lokal; Partisipasi Masyarakat; Kohesi Sosial

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi yang berkualitas (Heinrich et al., 2022). Di daerah terpencil seperti Kabupaten Asmat, pelayanan publik memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan pembangunan yang disebabkan oleh keterbatasan geografis dan infrastruktur. Dengan menyediakan layanan yang inklusif dan merata, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Poed, 2020). Lebih jauh, pelayanan publik yang baik menjadi katalisator bagi pemberdayaan masyarakat, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Pelayanan publik yang efektif dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (Jackson, 2020). Hal ini penting untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tambaip et al., 2024). Di Kabupaten Asmat, di mana tingkat pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain, keberadaan pelayanan publik yang responsif menjadi sangat krusial (Lapuente & Van de Walle, 2020). Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan yang memadai, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, sehingga mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Asmat memiliki karakteristik geografis yang unik, berupa wilayah rawa-rawa dan sungai yang luas, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam distribusi layanan publik. Jarak antar desa yang jauh dan sulitnya akses transportasi menyebabkan layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi menjadi tidak merata. Selain itu, infrastruktur yang terbatas, seperti jalan raya dan fasilitas komunikasi, memperburuk kondisi ini, sehingga banyak masyarakat harus menempuh perjalanan yang panjang untuk mendapatkan layanan dasar (Kaiser & Barstow, 2022). Tantangan geografis ini menuntut pendekatan pelayanan publik yang adaptif dan berbasis lokal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik (Willets et al., 2022).

Di sisi lain, tantangan sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik di Asmat. Sebagian besar masyarakat Asmat masih memegang teguh adat istiadat mereka, yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan formal dari pemerintah. Tingkat literasi yang rendah serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik juga menjadi kendala dalam proses pemberian layanan (Kosec & Wantchekon, 2020). Hal ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya memahami kebutuhan masyarakat tetapi juga menghormati kearifan lokal mereka. Strategi pelayanan yang mempertimbangkan aspek budaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan komunitas lokal (Ali et al., 2021).

Kementerian Agama memiliki peran yang signifikan dalam penyediaan layanan administratif, seperti pencatatan nikah, pengelolaan haji, dan sertifikasi halal, yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Asmat, peran ini diperluas menjadi agen pemberdayaan melalui program-program yang mendukung pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat, Kementerian Agama sering kali menjadi penghubung antara kebutuhan lokal dengan kebijakan nasional. Dengan pendekatan yang inklusif, Kementerian Agama dapat mendorong terciptanya harmoni sosial, yang penting untuk mendukung pembangunan di wilayah yang rentan terhadap konflik sosial. Lebih dari sekadar penyedia layanan administratif, Kementerian Agama juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keagamaan, pelatihan, dan advokasi nilai-nilai keberagaman. Program-program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan. Di Kabupaten Asmat, pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya yang kompleks. Dengan memanfaatkan jaringan dan kepercayaan yang telah terbangun di komunitas lokal, Kementerian Agama mampu menciptakan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih berkelanjutan (Suriyankietkaew et al., 2022).

Pelayanan publik di Kabupaten Asmat menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan infrastruktur, yang menghambat akses dan distribusi layanan dasar. Wilayah yang terdiri dari rawa-rawa dan sungai menyebabkan transportasi darat menjadi hampir tidak memungkinkan, sehingga masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh menggunakan perahu atau moda transportasi lainnya yang memerlukan biaya tinggi. Minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas komunikasi memperparah situasi ini, membuat penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi menjadi tidak merata (Hendricks & Van Zandt, 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia, yang memiliki kebutuhan mendesak tetapi sulit dijangkau oleh penyelenggara layanan publik.

Selain kendala infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi isu utama dalam pelayanan publik di Asmat. Banyak posisi strategis di sektor pelayanan publik diisi oleh tenaga kerja dengan keterbatasan kualifikasi, yang berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan dan implementasi program. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk aspek sosial dan budaya, sering kali menyebabkan program pelayanan publik tidak relevan dengan kondisi lapangan. Misalnya, banyak kebijakan atau layanan yang tidak memperhitungkan kearifan lokal atau praktik adat setempat, sehingga kurang diterima oleh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan intensif bagi para petugas dan pengambil kebijakan, serta pendekatan berbasis partisipasi masyarakat agar pelayanan publik lebih inklusif dan efektif.

Kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat lokal menjadi tantangan yang signifikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Asmat. Kebijakan yang dirancang di tingkat pusat sering kali tidak mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya unik di wilayah terpencil seperti Asmat, sehingga sulit diterapkan secara efektif. Akibatnya, banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masyarakat setempat, menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan lokal juga memperparah situasi, karena kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan realitas lapangan (Birchall et al., 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan akses dan kualitas layanan publik, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Minimnya penelitian terkait dampak pelayanan publik terhadap pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil semakin memperburuk masalah ini. Penelitian yang ada sering kali berfokus pada aspek teknis dan administratif tanpa menggali bagaimana layanan tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, kebijakan yang diimplementasikan tidak berbasis data yang akurat dan relevan, sehingga tidak memberikan solusi yang efektif untuk tantangan di lapangan. Dengan adanya penelitian yang komprehensif dan partisipatif, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat Asmat dan mengembangkan strategi pelayanan publik yang lebih responsif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian Agama di Kabupaten Asmat, menganalisis dampak mekanisme pelayanan berbasis lokal, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah terpencil.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran Kementerian Agama dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Asmat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik, menggali perspektif berbagai pihak yang terlibat, dan memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Studi kasus dipilih karena relevansi konteks lokal yang spesifik, memungkinkan peneliti untuk fokus pada konteks unik Kabupaten Asmat, di mana tantangan geografis, sosial, dan budaya mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman langsung, persepsi, serta makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap program-program yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama. Pemilihan pendekatan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memahami interaksi antara kebijakan dan realitas lokal, serta bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diadaptasi oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dan studi kasus menjadi metode yang tepat untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual terkait pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil seperti Kabupaten Asmat.

Penelitian ini melibatkan sekitar 30 hingga 40 subjek yang terdiri dari empat kelompok utama. Pertama, petugas Kementerian Agama sebanyak 10-15 orang, yang meliputi kepala kantor, pegawai administrasi, dan penyuluh agama, yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan publik dan program pemberdayaan. Kedua, tokoh agama sebanyak 5-7 orang, yang memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan nilai-nilai agama dan sosial kepada masyarakat setempat. Ketiga, tokoh adat yang jumlahnya sekitar 5-6 orang, yang memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan adat istiadat masyarakat Asmat, serta dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Keempat, masyarakat lokal yang terlibat dalam program pemberdayaan, yang jumlahnya sekitar 10-15 orang, terdiri dari penerima manfaat langsung dari program Kementerian Agama, seperti warga yang mengikuti pelatihan atau program sosial lainnya. Pemilihan jumlah dan komposisi subjek ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah tersebut, serta untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dengan pejabat Kementerian Agama untuk memperoleh informasi spesifik mengenai kebijakan dan prosedur pelayanan, serta wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama, tokoh adat, dan penerima manfaat untuk menggali pandangan mereka tentang pengalaman dalam mengikuti program pemberdayaan. Durasi wawancara berkisar antara 30 hingga 60 menit, disesuaikan dengan kedalaman topik yang dibahas, dan dilakukan secara tatap muka dengan panduan pertanyaan yang fleksibel. Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan dengan peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan Kementerian Agama untuk mengamati dinamika sosial yang terjadi. Dokumentasi yang dianalisis mencakup laporan tahunan Kementerian Agama, dokumen kebijakan, arsip program pemberdayaan, serta catatan pelatihan dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Analisis terhadap dokumen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Asmat.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, tantangan pelayanan publik, dan dampak program berbasis lokal di Kabupaten Asmat. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan pola-pola yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk memahami dinamika yang ada. Untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, dilakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat lokal. Triangulasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi kesesuaian antara perspektif yang berbeda dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian, memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah terpencil seperti Kabupaten Asmat. Salah satu institusi yang berperan besar dalam hal ini adalah Kementerian Agama, yang tidak hanya memberikan pelayanan administrasi keagamaan, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program berbasis nilai-nilai agama. Di Kabupaten Asmat, pelayanan publik ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan keterampilan, serta membangun hubungan yang harmonis antarindividu dan kelompok. Program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, penting untuk memahami konteks pemberdayaan yang dijalankan oleh Kementerian Agama di wilayah tersebut.

Tabel 1. Peran Kementerian Agama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Asmat

Aspek	Temuan Penelitian
Peran Kementerian Agama	Kementerian Agama berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga agen pemberdayaan masyarakat.
Program Keagamaan	Program pelatihan rohani, penyuluhan agama, dan pendidikan moral berhasil meningkatkan kesadaran sosial masyarakat.
Peningkatan Kohesi Sosial	Program-program keagamaan memperkuat hubungan antarwarga dan meningkatkan solidaritas dalam komunitas lokal.
Dampak pada Masyarakat	Pemberdayaan melalui program keagamaan berkontribusi pada penguatan struktur sosial dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.
Kendala	Beberapa kendala terkait keterbatasan infrastruktur dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga berperan penting sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Program-program keagamaan yang dilaksanakan, seperti pelatihan rohani, penyuluhan agama, dan pendidikan moral, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial masyarakat dan memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Selain itu, pemberdayaan melalui program-program tersebut turut memperkuat struktur sosial dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan. Namun, kendala terkait keterbatasan infrastruktur dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi program masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak positifnya.

Tabel 2. Tantangan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Asmat

Tantangan	Penjelasan
Faktor Geografis	Akses transportasi yang sulit dan wilayah terpencil menghambat distribusi layanan publik yang merata ke seluruh daerah di Kabupaten Asmat.
Minimnya Infrastruktur	Terbatasnya fasilitas dasar seperti jalan raya, jembatan, dan sistem komunikasi memperburuk akses masyarakat terhadap layanan publik.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten di sektor pelayanan publik menyebabkan kualitas layanan rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kurangnya Pemahaman terhadap Kearifan Lokal	Kebijakan yang tidak mempertimbangkan adat dan budaya lokal seringkali tidak diterima oleh masyarakat, membuat pelayanan menjadi kurang efektif.

Tantangan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan publik di Kabupaten Asmat mencakup beberapa aspek kritis. Faktor geografis, seperti akses transportasi yang terbatas dan wilayah yang terpencil, menyulitkan distribusi layanan secara merata ke seluruh daerah. Minimnya infrastruktur dasar, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem komunikasi, semakin memperburuk akses masyarakat terhadap layanan yang diperlukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di sektor pelayanan publik berdampak pada kualitas layanan yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal menyebabkan kebijakan yang tidak selaras dengan adat dan budaya setempat, sehingga pelayanan publik menjadi kurang efektif dan sulit diterima oleh masyarakat.

Tabel 3. Efek Positif Pelayanan Berbasis Lokal dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Asmat

Aspek	Temuan
Perhitungan Budaya dan Tradisi	Pelayanan yang mempertimbangkan budaya dan tradisi masyarakat Asmat meningkatkan keterlibatan mereka dalam program pemerintah.
Kepercayaan Masyarakat	Pendekatan berbasis lokal berhasil membangun kepercayaan yang lebih besar antara masyarakat dan pemerintah.
Peningkatan Partisipasi	Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
Dampak Sosial	Meningkatnya kerjasama sosial dan penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Asmat.
Dampak Ekonomi	Program pemberdayaan berbasis lokal meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses ke sumber daya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang memperhitungkan budaya dan tradisi masyarakat Asmat secara signifikan meningkatkan keterlibatan mereka dalam program-program pemerintah. Pendekatan berbasis lokal berhasil membangun kepercayaan yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Dampak sosial yang terlihat mencakup peningkatan kerjasama antarwarga dan penguatan nilai-nilai kebersamaan, sementara dari sisi ekonomi, program pemberdayaan ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan serta akses lebih baik terhadap sumber daya yang ada.

Pelayanan publik memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah terpencil (Liu et al., 2020). Sebagai instrumen utama pemerintah, pelayanan publik berperan dalam menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Di wilayah terpencil dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang minim, pelayanan publik menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan akses dan memberikan peluang yang setara bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui pendekatan yang inklusif dan responsif, pelayanan publik dapat menjadi katalisator dalam membangun modal sosial dan menciptakan komunitas yang lebih mandiri secara sosial dan ekonomi (McCall et al., 2021).

Untuk memastikan dampak yang berkelanjutan, pelayanan publik di wilayah terpencil harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan karakteristik budaya masyarakat. Pendekatan berbasis lokal yang memprioritaskan dialog dan partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan kebijakan yang relevan dan dapat diterima (Brondízio et al., 2021). Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif tetapi juga sebagai alat untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka secara produktif (Osborne et al., 2021). Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kohesi sosial yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Peran kelembagaan dalam mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan dengan praktik pelayanan publik sangat penting untuk mencapai efektivitas program di lapangan (Meuleman, 2021). Kementerian Agama, sebagai salah satu institusi yang berperan di Kabupaten Asmat, menunjukkan bagaimana kelembagaan dapat menjadi agen perubahan melalui pelayanan yang tidak hanya administratif tetapi juga transformatif. Dengan kebijakan yang selaras antara tingkat pusat dan daerah, kelembagaan ini mampu mengimplementasikan program pemberdayaan yang berbasis nilai-nilai agama (Permatasari et al.,

2021), seperti pendidikan moral dan pelatihan spiritual, yang memberikan dampak positif pada pembentukan karakter dan solidaritas masyarakat.

Keberhasilan integrasi kebijakan dan praktik tersebut bergantung pada koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dan fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan kondisi lokal (Fromhold-Eisebith et al., 2021). Kelembagaan yang efektif harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pusat melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif. Misalnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin adat dalam proses perencanaan dan implementasi, pelayanan publik dapat lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil.

Kabupaten Asmat memiliki kondisi geografis yang kompleks, terdiri dari wilayah rawa-rawa, sungai, dan dataran rendah yang sulit diakses oleh moda transportasi konvensional. Hal ini menyebabkan layanan publik sering kali tidak dapat menjangkau komunitas terpencil secara optimal. Keterbatasan infrastruktur, seperti minimnya jalan, jembatan, dan fasilitas komunikasi, menghambat distribusi pelayanan dasar, termasuk layanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan (Boakye et al., 2022). Situasi ini memaksa masyarakat untuk menempuh perjalanan panjang dan mahal ke pusat layanan, yang secara tidak langsung membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar. Selain itu, kurangnya jaringan listrik dan akses internet memperburuk keadaan, sehingga layanan berbasis digital yang dapat mempercepat birokrasi menjadi sulit diterapkan (Wirata et al., 2025).

Ketergantungan pada infrastruktur tradisional juga memperpanjang waktu respons terhadap kebutuhan mendesak, seperti pengurusan dokumen administratif atau bantuan kemanusiaan (Paulus et al., 2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya upaya sistematis dari pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki infrastruktur dasar dan mengadopsi teknologi yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis. Pendekatan inovatif seperti layanan bergerak dan pemanfaatan transportasi air dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjangkau masyarakat terpencil, sekaligus memberikan efek jangka panjang dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik (Thomson, 2021).

Masyarakat Asmat memiliki sistem sosial dan budaya yang kaya, dengan tradisi yang kuat terkait adat istiadat dan pola hidup komunal. Nilai-nilai ini sangat memengaruhi cara masyarakat merespons dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Misalnya, pendekatan berbasis kelompok lebih diterima dibandingkan intervensi individual, karena sejalan dengan prinsip kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh komunitas lokal (Appiah, 2022). Namun, kurangnya pemahaman petugas pelayanan publik terhadap kearifan lokal sering kali menyebabkan program yang dirancang di tingkat pusat kurang relevan atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif budaya untuk memastikan bahwa program pemberdayaan selaras dengan norma dan tradisi setempat. Di sisi lain, keberadaan tokoh adat dan pemimpin agama sebagai figur otoritas sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah. Kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dan tokoh lokal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan (Lansing et al., 2023). Namun, keberhasilan kolaborasi ini memerlukan komunikasi yang intensif dan saling menghormati antara kedua pihak. Dengan memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat Asmat, pemerintah dapat mengembangkan program yang lebih inklusif dan efektif, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di wilayah terpencil.

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, mencakup administrasi pernikahan, sertifikasi halal, dan pengelolaan ibadah haji. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan agama dan bimbingan moral. Di Kabupaten Asmat, tugas ini menjadi lebih kompleks mengingat kondisi geografis dan sosial budaya yang memerlukan adaptasi pendekatan layanan. Selain memberikan akses terhadap layanan dasar, Kementerian Agama juga bertanggung jawab membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui penyediaan layanan yang adil, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Lebih dari sekadar tugas administratif, Kementerian Agama berperan sebagai agen pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Asmat. Melalui bimbingan rohani dan pendidikan keagamaan, kementerian ini membantu memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial, yang menjadi dasar untuk membangun kohesi komunitas (Agung et al., 2024). Selain itu, dengan melibatkan tokoh agama dan adat dalam pelaksanaan program-programnya, Kementerian Agama mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi aktif masyarakat. Peran ini semakin penting dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi, karena memungkinkan masyarakat lokal untuk tidak hanya menerima layanan tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

Kementerian Agama di Kabupaten Asmat telah menjalankan berbagai program berbasis agama yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pelatihan keagamaan yang tidak hanya memperkuat pemahaman spiritual tetapi juga menanamkan nilai-nilai kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab. Program ini mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis, sehingga masyarakat dapat lebih mudah berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kolektif seperti pembangunan infrastruktur desa atau pengelolaan sumber daya bersama. Pendekatan berbasis agama ini efektif karena relevan dengan sistem nilai yang dipegang kuat oleh masyarakat setempat (Cavalcanti Junqueira et al., 2023). Selain aspek sosial, program berbasis keagamaan juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Misalnya, pelatihan kewirausahaan dengan pendekatan nilai-nilai Islam mendorong masyarakat untuk mengelola usaha secara etis dan berkelanjutan. Program ini memberikan keterampilan praktis sekaligus membangun mentalitas kemandirian, yang sangat penting di wilayah terpencil dengan akses ekonomi terbatas seperti Asmat. Dengan sinergi antara bimbingan spiritual dan pelatihan teknis, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga termotivasi untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber penghidupan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program berbasis agama tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Asmat menjadi salah satu tantangan utama dalam pelayanan publik. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang sulit dijangkau, dengan minimnya fasilitas transportasi darat dan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan komunikasi. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat tetapi juga menghambat distribusi layanan publik yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Akibatnya, banyak masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan, yang sering kali disertai dengan biaya tinggi dan risiko perjalanan yang berbahaya. Situasi ini juga berdampak pada efisiensi kerja petugas layanan publik, yang menghadapi kendala besar dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selain infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi isu signifikan. Banyak petugas yang kurang memiliki pelatihan memadai untuk menangani tantangan unik di daerah terpencil seperti Asmat, baik dari segi teknis maupun sosial. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik yang diterima masyarakat, sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas yang mencakup pelatihan teknis, pemahaman budaya lokal, serta pengembangan keterampilan komunikasi, sehingga petugas dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan efektif di tengah keterbatasan yang ada.

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk kearifan budaya yang menjadi bagian integral kehidupan mereka. Banyak kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dirancang tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga tidak relevan dengan realitas di lapangan. Misalnya, pendekatan top-down sering kali mengabaikan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Asmat, menyebabkan program tidak mendapatkan dukungan penuh dari komunitas lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan nasional dan kearifan lokal untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pelayanan publik (Atahau et al., 2020). Lebih jauh, upaya untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal juga terkendala oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang kurang inklusif membuat masyarakat merasa diabaikan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan menolak program-program yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme partisipasi yang lebih kuat, di mana masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka secara langsung. Kolaborasi dengan tokoh adat dan pemimpin lokal juga sangat penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan komunitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Pelayanan publik berbasis lokal yang memperhitungkan budaya dan tradisi masyarakat Asmat terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Riojas-Díaz et al., 2022). Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan dan implementasi program, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Kepercayaan ini tumbuh seiring dengan adanya kesesuaian antara program yang dilaksanakan dan kebutuhan riil masyarakat, yang sebelumnya sering terabaikan oleh pendekatan yang terlalu sentralistik. Sebagai contoh, pelibatan tokoh adat dan agama dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan program pelayanan publik menciptakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal. Peningkatan kepercayaan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan adanya kepercayaan yang terbangun, masyarakat lebih aktif berkontribusi dalam program-program seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan agama, dan inisiatif sosial lainnya. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan keberhasilan program-program tersebut. Partisipasi yang tinggi memungkinkan penyampaian umpan balik dari masyarakat, yang pada akhirnya membantu perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang, menciptakan siklus peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan (Malodia et al., 2021).

Kontribusi pelayanan publik terhadap kohesi sosial di Kabupaten Asmat terlihat dari semakin kuatnya interaksi dan kerjasama antar anggota masyarakat. Program-program berbasis lokal yang melibatkan komunitas, seperti pelatihan berbasis kelompok dan diskusi keagamaan, telah membantu membangun solidaritas dan rasa kebersamaan. Kehadiran pemerintah melalui Kementerian Agama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat juga meningkatkan kepercayaan antar anggota komunitas, memperkuat hubungan sosial yang sebelumnya rentan terhadap konflik internal. Kohesi sosial yang tercipta memberikan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat (Huda et al., 2020). Selain itu, program pelayanan publik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Asmat. Pelatihan keterampilan berbasis lokal, seperti pengelolaan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil, memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dalam aspek kualitas hidup, adanya layanan yang lebih terjangkau dan relevan, seperti program pendidikan agama dan penyuluhan kesehatan, berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Dampak ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

Pengembangan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan di wilayah terpencil seperti Kabupaten Asmat. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk aspek budaya, sosial, dan geografis yang unik. Materi pelatihan juga perlu mencakup manajemen pelayanan berbasis inklusi sosial, komunikasi interpersonal yang efektif, serta kemampuan untuk merancang program yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan kompetensi yang lebih baik, petugas diharapkan dapat memberikan layanan yang tidak hanya efisien tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan penerima layanan (Sønderskov & Rønning, 2021). Lebih lanjut, pelatihan ini harus bersifat berkelanjutan dengan melibatkan mitra lokal seperti lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memperkuat wawasan dan praktik terbaik. Proses evaluasi berkala terhadap hasil pelatihan juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan demikian, pengembangan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga memperkuat sistem pelayanan publik secara keseluruhan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil.

Implementasi pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan tokoh lokal menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan responsif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh adat dan agama lokal dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga pelayanan lebih mudah diterima dan diakses oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi solusi lokal yang sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi (Ocloo et al., 2021). Misalnya, dalam penyediaan layanan pendidikan atau kesehatan, masukan masyarakat dapat digunakan untuk menentukan lokasi dan jadwal pelayanan yang lebih efektif. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan program, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak, pelayanan publik di daerah terpencil seperti Asmat dapat lebih optimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi potensial untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Asmat. Teknologi seperti aplikasi mobile dan platform daring dapat digunakan untuk menyediakan informasi layanan, melakukan pendaftaran online, atau bahkan memberikan pelayanan administratif secara jarak jauh. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan tetapi juga memperluas jangkauan kepada masyarakat di daerah terpencil yang sulit diakses secara fisik. Selain itu, data yang terkumpul melalui platform digital dapat digunakan untuk analisis kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan dan program dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran (Tambaip & Tjilen, 2023). Namun, implementasi teknologi digital memerlukan kesiapan infrastruktur dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet di wilayah terpencil serta memberikan edukasi teknologi bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital dengan optimal. Dengan pendekatan yang terencana, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil seperti Kabupaten Asmat.

## KESIMPULAN

Pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah terpencil seperti Kabupaten Asmat. Dengan menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi, pelayanan publik menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas sering kali menghambat efektivitas pelayanan. Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan berbasis lokal yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam perencanaan serta implementasi program menjadi strategi yang relevan. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, pelayanan publik dapat dirancang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis nilai agama yang dijalankan Kementerian Agama di Kabupaten Asmat telah memberikan dampak positif terhadap kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program seperti pelatihan keterampilan berbasis nilai spiritual tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga membangun solidaritas dan rasa kebersamaan. Dengan pemahaman budaya lokal dan komunikasi yang intensif, pelayanan publik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang responsif dan adaptif dapat menjadi katalisator transformasi sosial dan ekonomi di wilayah terpencil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Asmat atas dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam penelitian ini. Kontribusi berupa data, wawasan, serta akses terhadap berbagai sumber informasi sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada STISIPOL Yaleka Maro atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian. Bantuan dari para dosen dan staf akademik sangat membantu dalam memperkaya analisis serta memperkuat temuan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan di bidang yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D. A. G., Nasih, A. M., & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100827.
- Ali, T., Paton, D., Buergelt, P. T., Smith, J. A., Jehan, N., & Siddique, A. (2021). Integrating Indigenous perspectives and community-based disaster risk reduction: A pathway for sustainable Indigenous development in Northern Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 59, 102263.
- Appiah, R. (2022). Context matters: Sociocultural considerations in the design and implementation of community-based positive psychology interventions in sub-Saharan Africa. *Culture & Psychology*, 28(4), 613–639.
- Atahau, A. D. R., Huruta, A. D., & Lee, C.-W. (2020). Rural microfinance sustainability: Does local wisdom driven-governance work? *Journal of Cleaner Production*, 267, 122153.
- Birchall, S. J., Bonnett, N., & Kehler, S. (2023). The influence of governance structure on local resilience: Enabling and constraining factors for climate change adaptation in practice. *Urban Climate*, 47, 101348.

- Boakye, J., Guidotti, R., Gardoni, P., & Murphy, C. (2022). The role of transportation infrastructure on the impact of natural hazards on communities. *Reliability Engineering & System Safety*, 219, 108184.
- Brondízio, E. S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bates, P., Carino, J., Fernández-Llamazares, Á., Ferrari, M. F., Galvin, K., Reyes-García, V., McElwee, P., & Molnár, Z. (2021). Locally based, regionally manifested, and globally relevant: Indigenous and local knowledge, values, and practices for nature. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 481–509.
- Cavalcanti Junqueira, M. I., Discua Cruz, A., & Gratton, P. C. (2023). Not by what we see: how Christian religious beliefs influence market and community logics in a rural context. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(5), 1176–1206.
- Fromhold-Eisebith, M., Marschall, P., Peters, R., & Thomes, P. (2021). Torn between digitized future and context dependent past—How implementing ‘Industry 4.0’ production technologies could transform the German textile industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120620.
- Heinrich, C. J., Camacho, S., Henderson, S. C., Hernández, M., & Joshi, E. (2022). Consequences of administrative burden for social safety nets that support the healthy development of children. *Journal of Policy Analysis and Management*, 41(1), 11–44.
- Hendricks, M. D., & Van Zandt, S. (2021). Unequal protection revisited: Planning for environmental justice, hazard vulnerability, and critical infrastructure in communities of color. *Environmental Justice*, 14(2), 87–97.
- Huda, M., Nor Muhamad, N. H., Isyanto, P., Muhamat, R., Marni, N., Ahmad Kilani, M., & Safar, J. (2020). Building harmony in diverse society: insights from practical wisdom. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 149–165.
- Jackson, E. A. (2020). Importance of the Public Service in achieving the UN SDGs. In *Decent Work and Economic Growth* (pp. 551–561). Springer.
- Kaiser, N., & Barstow, C. K. (2022). Rural transportation infrastructure in low-and middle-income countries: a review of impacts, implications, and interventions. *Sustainability*, 14(4), 2149.
- Kosec, K., & Wantchekon, L. (2020). Can information improve rural governance and service delivery? *World Development*, 125, 104376.
- Lansing, A. E., Romero, N. J., Siantz, E., Silva, V., Center, K., Casteel, D., & Gilmer, T. (2023). Building trust: Leadership reflections on community empowerment and engagement in a large urban initiative. *BMC Public Health*, 23(1), 1252.
- Lapuate, V., & Van de Walle, S. (2020). The effects of new public management on the quality of public services. *Governance*, 33(3), 461–475.
- Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. *Journal of Rural Studies*, 79, 177–188.
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102.
- McCall, J. R., Bussing, A., Hoyman, M. M., & Paarlberg, L. E. (2021). Place matters: government capacity, community characteristics, and social capital across United States counties. *Journal of Public Policy*, 41(4), 677–705.
- Meuleman, L. (2021). Public administration and governance for the SDGs: Navigating between change and stability. *Sustainability*, 13(11), 5914.
- Ocloo, J., Garfield, S., Franklin, B. D., & Dawson, S. (2021). Exploring the theory, barriers and enablers for patient and public involvement across health, social care and patient safety: a systematic review of reviews. *Health Research Policy and Systems*, 19, 1–21.
- Osborne, S. P., Nasi, G., & Powell, M. (2021). Beyond co-production: Value creation and public services. *Public Administration*, 99(4), 641–657.
- Paulus, D., Fathi, R., Fiedrich, F., de Walle, B. Van, & Comes, T. (2024). On the interplay of data and cognitive bias in crisis information management: An exploratory study on epidemic response. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 391–415.
- Permatasari, P., Iman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294.
- Poed, S. (2020). Social inclusion and equal access to high-quality, inclusive education. *Quality Education*, 780–789.
- Riojas-Díaz, K., Jaramillo-Romero, R., Calderón-Vargas, F., & Asmat-Campos, D. (2022). Sustainable Tourism and Renewable Energy’s Potential: A Local Development Proposal for the La Florida Community, Huaral, Peru. *Economies*, 10(2), 47.
- Sønderskov, M., & Rønning, R. (2021). Public service logic: An appropriate recipe for improving serviceness in the public sector? *Administrative Sciences*, 11(3), 64.
- Suriyankietkaew, S., Krittayaruangroj, K., & Iamsawan, N. (2022). Sustainable Leadership practices and competencies of SMEs for sustainability and resilience: A community-based social enterprise study. *Sustainability*, 14(10), 5762.
- Tambaip, B., Riyanto, P., Tjilen, A. P., Negara, I. A., & Musamus, U. (2024). *Penguatan Sistem Manajemen SDM untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan di Lingkungan Desa*. 1(10), 1611–1619.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101–110.
- Thomson, P. (2021). Remote monitoring of rural water systems: A pathway to improved performance and sustainability? *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 8(2), e1502.
- Willets, J., Priadi, C., Ombasta, O., Wulandari, D., Imtiyaz, I., Sudhiastiningsih, N. N. S. N., Kohlitz, J., Mills, F., & Listyasari, M. (2022). Co-developing evidence-informed adaptation actions for resilient citywide sanitation: Local

government response to climate change in Indonesia. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(8), 2129–2150.

Wirata, G., Indrayana, C. P., & Suargita, I. N. (2025). Urgency of digital-based public service innovation policies to anticipate in the future of a pandemi. In *Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era* (pp. 82–87). Routledge.